



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayahnya semata sehingga "Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara" Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun.

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Ranhir Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 belum sempurna, untuk itu di harapkan kritik dan sarannya, agar pada masa mendatang dapat disempurnakan lagi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Ranhir Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Renja Dinas Ketahanan Pangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 6 Agustus 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra PD Tahun 2025.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan	40
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
4.1. Program dan Kegiatan.....	42
V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

TABEL 1	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	11
TABEL 2	REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 ...	12
TABEL 3	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023	19
TABEL 4	CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023	20
TABEL 5	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN.....	22
TABEL 6	REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025	30
TABEL 7	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN.....	38
TABEL 8	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	42
TABEL 9	RINGKASAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025.....	43
TABEL 10	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun secara bersinergi dan terintegrasi antara prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (Satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas membantu Bupati dalam Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan

sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan segenap proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya dengan harga yang terjangkau.

Mengingat begitu strategisnya peranan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta seiring untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan bahagia". Juga sejalan dengan Visi Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pangan yang Inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan". Serta sesuai arah kebijakan Badan Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 "Meningkatkan Tata Kelola sistem Pangan Nasional yang inklusif tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan)" maka Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai **misi 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**, maka perlu disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari program Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
2. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan acuan Dinas Ketahanan Pangan untuk memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) tahun 2025.
3. Renja Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
3. Program/kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program/kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nonor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan atas Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2023.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 mempunyai tujuan :

- a. Memberikan acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasarannya.
- b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah agar subsantsi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunanRAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2024.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan pada APBD perubahan dianggarkan sebesar Rp.26.269,272.863,00 dengan realisasisebesar Rp. 24.582.064.568,00 atau 93,58%, dari total alokasi yang ada.

Pagu Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1 :
Tabel Realisasi Anggaran tahun 2023

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai Sakip)	12.419.272.863,00	11.452.532.482,00	92,22
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras/Jagung) Sesuai Kebutuhan)	5.200.000.000,00	5.036.192.280,00	96,85
3.	Meningkatnya Skore Pola Panga Harapan	Konsumsi Energi dan protein Perkapita (Skore PPH Konsumsi)	8.650.000.000,00	8.093.339.806,00	93,56
		TOTAL	26.269.272.863,00	24.582.064.568,00	93,58

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat Tabel 2 (TC 29) sebagai berikut :

Tabel 2

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

DINAS KETAHANAN PANGAN										
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
1	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
1	Bidang Ketahanan Pangan									
0,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	89,45	80	89,45	111,81	81	89,45	110,43
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80	42 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	13 Dokumen	55 Dokumen	68,75
000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3 Dokumen	15 Dokumen	50,00
000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	25	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	20 laporan	80,00
000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	20 laporan	80,00
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	60	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270	162 Orang Bulan	54 Orang Bulan	54 Orang/bulan	100,00	56 Orang/bulan	218 Orang/Bulan	80,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	60	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	38 Bulan	60,00
000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,00	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00	3 Paket	9 Paket	90,00
000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	2 Paket	10 Paket	100,00
000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	9 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	12 Paket	80,00
000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1250,00	660 Laporan	160 Laporan	160 Laporan	84,00	250 Laporan	1050 Laporan	56,80
000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000,00	5000 dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100,00	2000 Dokumen	7000 Dokumen	70,00

000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	60	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	48 Bulan	80,00
000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	12 Laporan	24 Laporan	40,00
000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	150	90 Unit	30 Unit	24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4	100,00	24 Unit Roda 2, 6 Unit Roda 4	96 Unit Roda 2, 24 Unit Roda 4	80,00
000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	8 Unit	80,00
000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	85 Unit	29 Unit	29 Unit	100,00	28 Unit	113 Unit	80,71
2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	49	24 Unit	2 Unit	17 Unit	100,00	11 Unit	35 Unit	71,43
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49	24 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00	11 Unit	35 Unit	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat	16	7 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	10 Unit	62,50
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terbangunnya Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	28	12 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00	6 Unit	18 Unit	64,29
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	7 Unit	140,00
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen Penyusunan Pemetaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	2225 Kkal/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari	2150 Kkal/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari	91,63	1970 Kkal/Kap/Hari	1970 Kkal/Kap/Hari	91,63
		Kecukupan Konsumsi Protein	57,25 Gram/Kap/Hari	61,4 Gram/Kap/Hari	57 Gram/Kap/Hari	61,4 Gram/Kap/Hari	107,09	61,4 Gram/Kap/Hari	61,4 Gram/Kap/Hari	107,09
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	<5	<5	4,5	111,11	5	5	100,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	2 Unit	4 Unit	80,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	250	308 Ton	300 Ton	308 Ton	102,67	150 Ton	300 Ton	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250	308 Ton	300 Ton	308 Ton	102,67	150 ton	300 ton	200,00
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	53 Ton	53 Ton	53 Ton	53 Ton	100,00	0	53 Ton	100,00
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan	150 Kelompok	70 Kelompok	35 Kelompok	35 Kelompok	100,00			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	5 dokumen	100,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150	70 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100,00	15 laporan	85 Dokumen	56,67
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5,00	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	1 Dokumen Laporan	4 Dokumen	80,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	25,00	24 Desa	5 Desa	19 Desa	380,00	19 Desa	43 Desa	172,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	4,00	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 dokumen	75,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen Peta analisis Ketahanan dan kerentanan Pangan (Peta FSVA)	4,00	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 dokumen	75,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Berkurangnya Jumlah Desa Yang Terindikasi Rawan pangan	25,00	24 Desa	5 Desa	19 Desa	380,00	5,00	39 Desa	156,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja-PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	1 Laporan	5 laporan	100
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	24 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen	380,00	15 Dokumen	39 Dokumen	156
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	95	95,35	91	95,35	104,78	91	95,35	104,78
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	95	95,35	91	95,35	104,78	89,00	95,35	107,17
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	20 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	4 Dokumen	13 Dokumen	65,00
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk sertifikasi	4 Sertifikat	2 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100,00	1 Sertifikat	3 Sertifikat	75,00
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapat rekomendasi	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	16 Dokumen	80,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 dokumen	16 Dokumen	80,00

Dari hasil evaluasi terhadap tabel TC 29 diatas, diketahui bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang masih belum memenuhi target kinerja/keluaran. Dan beberapa kegiatan capaian kinerjanya telah melebihi target yang di tetapkan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dari 5 Program yang ada pada dinas ketahanan pangan terdapat satu Program yang belum mencapai target yang telah di tetapkan, yaitu :
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat, untuk Indikator Kecukupan Konsumsi Energi masih belum tercapai, dari target yang ditetapkan sebesar dengan Indikator Angka Kecukupan Energi 2150 Kkal/Kap/Hari tercapai sebesar 1970 Kkal/Kap/Hari = 91,63%.
2. Dari 13 Kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang tidak tercapai target yang di tetapkan, yaitu kegiatan :
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
Dari target yang ditetapkan sebanyak 49 Unit sampai dengan akhir periode Renstra baru tercapai sebanyak 35 Unit, untuk itu perlu dilakukan Percepatan dan penambahan Anggaran untuk dapat merealisasikan target sampai dengan akhir periode Renstra.
3. Dengan tidak tercapainya target tahunan yang ditetapkan, maka harus dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun anggaran berikutnya.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tidak tercapainya target, adanya penganggaran untuk memberikan sosialisasi secara lebih luas tentang konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman), serta tambahan anggaran untuk penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Untuk Pembangunan Lumbung Pangan dan rantai jemur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan telah ditentukan target dan cara pengukurannya sebagaimana tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	Total Skore Hasil penilaian Dari Tim Inspektorat Kabupaten
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah	1. Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	130	Jumlah Pangan yang tersedia dibagi (Jumlah Penduduk x Kebutuhan Perkapita Tahunan)x 100%
	2. Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Score	97,89	Dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH untuk dikonsumsi oleh penduduk/ masyarakat.
	3. Ketersediaan Energi dan Proten Perkapita			Dihitung Melalui Perhitungan Neraca Bahan Makanan
	- Ketersediaan Energi	Kkal/kap/ hari	2378	
	- Ketersediaan Protein	Gram/kap/ hari	79,81	
Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi.	Skore	84	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, masih terdapat indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

- Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) dari Target yang ditetapkan sebesar 130% hanya tercapai 118,46
- Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan, dari target yang ditetapkan sebesar 97,89 tercapai 92,83

Meskipun ada Indikator yang tingkat Capaian Kinerjanya masih di bawah 100 dalam arti Target Kinerja tidak tercapai, tetapi Tingkat Capaian kinerja sudah termasuk dalam kategori Baik (diatas 90%). Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel.4 dibawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	Nilai	77	74,28	96,47	78	88,89	113,96	Meningkat
Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)	Persen	129	118	91,47	130	118,46	91,12	Menurun
	Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skore	96,48	93,66	97,08	97,89	92,83	94,83	Menurun
	Ketersediaan energi dan protein Perkapita								
	- Ketersediaan Energi	Kkal/Kap /Hari	2372	2458	103.63	2378	2779	116,86	Meningkat
	Ketersediaan Protein	Gram/ Kap/Hari	79,42	115	144,80	79,81	104,4	130,81	Menurun
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Desa	5	5	100	5	44	880	Meningkat
Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	Persen	90,77	95,35	104,78	91	98	107,69	Meningkat
Meningkatnya Skore Pola Pangan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	Skore	82	84,5	103,05	84	88,46	105,31	Meningkat

Pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas. Pada akhir Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan sebagaimana tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)

1) Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan)

Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai 118,46% dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada kelebihan sebanyak 18,46% dari kebutuhan. Pada Tahun 2023 Target Indikator Ketersediaan Pangan Utama sebesar 130% tercapai sebesar 118,46% dengan persentase capaian sebesar 91,12%

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 untuk ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan sebesar 0,46% dimana capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 118%

2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 97,89. Sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar 92,83 dengan tingkat Capaian kinerja sebesar 94,86%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 2,22%, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,08%.

2. Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi

untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2023 sebesar 88,46 dari target Tahun 2023 sebesar 84,00 atau dengan capaian sebesar 105,31%.

Secara Rinci Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 30 (Tabel 5) berikut ini :

Tabel 5
Tabel : T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)			129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	118,00	118,46	118,00	118,00	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya 118
2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan)			96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	93,66	92,83	92,83	92,83	Indikator Sasaran, ada Kecenderungan tidak tercapai Target, karena penetapan target di awal terlalu Tinggi. Rata2 Tercapainya Target Hanya kisaran 92 - 93
3	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita :												Indikator Sasaran
	- Ketersediaan Energi			2372,00	2378,00	2458,00	2458,00	2458,00	2458,00	2779,00	2700,00	2700,00	
	- Ketersediaan Protein			79,42	79,84	115,00	115,00	115,00	115,00	104,40	104,00	104,00	
4	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore Pola pangan harapan PPH Konsumsi)			82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	84,50	88,46	88,00	88,00	Indikator Sasaran, Untuk Skore PPH Meskipun Belum Ideal Cenderung Meningkat Tiap tahun
5	Cakupan sarana dan Prasarana Pendukung Kemandirian pangan			9,00	10,00	20,00	20,00	20,00	17,00	13,00	11,00	20,00	Indikator Program
6	Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein												
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)			2050,00	2150,00	2175,00	2200,00	2200,00	1933,00	1970,00	1970,00	1970,00	Indikator Program, Kecukupan Konsumsi Energi Cenderung tidak Tercapai Target yang ditetapkan, yang
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/kap/hari)			55,50	57,00	57,10	57,20	57,20	56,80	61,40	60,00	60,00	Indikator Program
7	Penanganan Kerawanan Pangan Pada Daerah Yang Terindikasi Rawan Pangan			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	44,00	45,00	45,00	Indikator Program
8	Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)			90,77	91,00	95,00	95,00	95,00	95,35	95,35	95,35	95,35	Indikator Program

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

1. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Pembangunan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan, maka dilakukan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan penyesuaian penyesuaian terhadap Program dan Kegiatan dalam pembangunan ketahanan pangan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan utama pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Belum Optimalnya ketersediaan pangan dengan Score PPH Ketersediaan yang belum sesuai harapan, serta Kecukupan Konsumsi Energi yang masih belum ideal. Permasalahan tersebut disebabkan :

- a. Sarana dan Prasarana pendukung Kemandirian Pangan Masih belum Memadai terutama apabila dihadapkan dalam rangka mempersiapkan Kutai Kartanegara sebagai Penyangga IKN.
 - b. Konsumsi Pangan Masyarakat masih belum Beragam Bergizi dan seimbang. Masih tingginya konsumsi beras perkapita, serta masih kurangnya konsumsi Buah dan sayur, karena Perilaku masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih cenderung sulit merubah pola makan ketergantungan akan beras ke (Pangan Alternatif).
 - c. Adanya keterbatasan kemampuan pengembangan sumber pangan lokal dan pengolahan bahan pangan local sebagai sumber pangan alternatif.
 - d. Pengetahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) yang masih rendah, karena kurangnya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui media yang bisa digunakan.
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan belum optimal. Belum adanya sinergitas kinerja diantara PD terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan, yang terdiri dari 6 Indikator kerawanan pangan sesuai peta FSVA (Akses Jalan, Akses air Bersih, Penyediaan Sarana dan Prasarana (Toko/Warung), Tenaga Kesehatan, Pemberdayaan/ Penanganan Penduduk Tidak Sejahtera, Lahan Pertanian).
 - f. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap keamanan pangan, terutama pangan segar, sehingga masih terdapat produk pangan segar yang tidak aman untuk dikonsumsi.
3. Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara

Sebagaimana Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Visinya "**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia**", Dalam hal ini urusan Ketahanan Pangan berperan untuk mendukung **misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**. Misi tersebut diintegrasikan kedalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya :

- a. Sarana dan Prasarana Kemandirian Pangan dalam Mendukung ketersediaan Pangan masih belum optimal, masih belum tersedianya Peta jalan tentang sarana pendukung kemandirian Pangan.
- b. Penanganan daerah rawan pangan dan rentan rawan pangan dengan berbagai penyebab yang bervariasi, yang berpengaruh pada ketersediaan pangan. Penanganan daerah rawan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.
- c. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

- d. Kebutuhan Pangan untuk Kesehatan Masyarakat modern yang peduli Kesehatan.

Untuk memperoleh produk pangan yang bermutu baik dan terjamin bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerangan pengendalian dan pengawasan dalam sistem jaminan mutu keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan Produksi Pangan Segar harus didorong dengan sistem yang aman sehingga produk Pangan Segar yang aman dikonsumsi.

Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu keamanan pangan. Terutama dalam rangka Kukar sebagai Lumbung Pangan Kaltim sebagai Penyangga IKN.

- e. Kebiasaan masyarakat dalam Konsumsi Pangan yang masih belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, kecenderungan memenuhi Konsumsi Energi dari Sumber Pangan Beras, dan belum bisa beralih ke sumber pangan alternatif berbasis Sumber Daya Lokal yang harganya Relatif lebih mahal dari pada mengkonsumsi Beras.

Selain tantangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu :

1. Masih tersedia sumber daya alam yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan dan penganeekaragaman pangan local.
2. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta organisasi masyarakat, Kelompok Wanita, yang memudahkan untuk sosialisidan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pangan beragambergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
4. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
5. Masih terbuka peluang pengembangan usaha dan Pengolahan Pangan Lokal yang belum dikelola dengan baik.

5. Isu – Isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan peta FSVA Tahun 2023, untuk Prioritas 2 dan 3 sebanyak 21 Desa. Kondisi ini sudah lebih Baik dari tahun sebelum. Beberapa faktor penyebab, belum terpenuhinya infrastruktur dasar pedesaan (Jalan), potensi sumber daya yang kurang memadai, belum adanya sarana air Bersih, Kurangnya Tenaga Kesehatan, Masih terdapat keluarga Prasejahtera. Masih kurangnya sinergisitas dan kolaborasi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Karena Kerawanan Pangan tidak bisa diselesaikan secara Parsial.

- 2). Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih belum sesuai dengan standar yang dala Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Kondisi ini bukan berarti kekurangan Pangan, tetapi masih kurangnya keberagaman Konsumsi Pangan yang akan tercermin dalam angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas.

- 3) Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Saat ini masih terdapat penggunaan bahan kimia yang melebihi ambang batas, masih ditemukannya pangan segar yang mengandung bahan kimia melebihi batas minimal residu (BMR). Akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen pangan Segar Asal Tumbuhan akan bahaya penggunaan Bahan kimia yang melebihi batas minimal Residu (BMR).

Masih sangat sedikit Produk Pangan Segar (Beras) yang sudah terregistrasi, dan produk pangan segar yang sudah bersertifikat juga masih sangat sedikit.

4) Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Kemandirian pangan, masih perlunya Ketersediaan Lantai jemur dalam meningkatkan kualitas Produksi Pangan dalam Pengeringan, Serta Lumbung Pangan Masyarakat yang masih belum sesuai dengan Kebutuhan. Masih diperlukan pemetaan Kebutuhan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan

5) Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi Pangan

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Belum memadainya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan, sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isupenting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2024. Dalam Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan perkiraan kebutuhan. Setelah dilakukan rewiuw dan analisa kebutuhan, terdapat perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap rencana yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 10.877.786.621,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Setelah dilakukan reviu dan analisa maka rancangan akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan menjadi 5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.76.120.164.434,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Penyesuaian Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dilakukan untuk dapat mengakomodir Kepentingan Masyarakat, untuk pembayaran Gaji dan tunjangan ASN, Fasilitas Penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota Berupa sub kegiatan untuk penunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pengadaan Kendaraan Dinas, pengadaan Mebeler, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, serta untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya penyesuaian Rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian Anggaran Gaji ASN sesuai dengan hasil rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD karena kenaikan Gaji Pegawai dan Mutasi Pegawai masuk ke Dinas Ketahanan Pangan
2. Untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Serta Sub Kegiatan dalam rangka Administrasi Barang Milik Daerah
3. Untuk menunjang Sarana Pendukung Program penunjang Urusan Kabupaten Kota yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Disiplin ASN dengan Pengadaan pakaian Dinas. Serta Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah berupa Pengadaan Mobil Jabatan Pejabat Eselon 3, Pengadaan Mebel dan Penataan Interior Ruang Kerja.
4. Penambahan Sub Kegiatan dan anggaran dalam rangka Rencana Aksi Penurunan Stunting sesuai yang telah di masukkan dalam Aksi Bangsa Kementrian Dalam Negeri
5. Anggaran Untuk Menunjang Tugas Fungsi dinas Ketahanan Pangan dalam rangka stabilisasi harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi

Secara Lengkap dapat dilihat dalam Tabel 6 Matrik TC 31 sebagai berikut :

Tabel 6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara
(7C-31)

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KAB KUKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	7.637.786.621,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KAB KUKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	14.077.104.434,00	
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	350.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	1.000.000.000,00	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000,00	Perencanaan termasuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, serta Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat (APBN dan DAK, APBD Prov dan Bantuan Keuangan) Pagu Awal 80.000.000 menjadi 150.000.000, Fasilitas untuk Rapat koordinasi internal dan eksternal dalam Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Pagu Awal 20.000.000 menjadi 50.000.000, penyusunan Renstra 2025-2030 dengan subtansi isi mengkaji
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	150.000.000,00	Kegiatan Untuk Melaksanakan Analisis permasalahan capaian kinerja melalui hasil E Pantau Tri Wulan 1,2,3,4 dan Laporan Akhir P (pagu Awal 100.000.000 menjadi 150.000.000
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Sub Kegiatan Baru) Untuk Pemenuhan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	KAB KUKAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	0	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	KAB KUKAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00	Untuk Pemenuhan Dokumen Pada Satu Data Indonesia Kukar, atau Data (BECIK) Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) (Sub Kegiatan baru)
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	KAB KUKAR	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	KAB KUKAR	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Untuk Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Tahun 2026, dan Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	6.303.737.861,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	8.626.795.674,00	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	8.466.795.674,00	Mengikuti hasil perhitungan tahun 2024 untuk mengantisipasi kenaikan Gaji dan Perpindahan Pegawai sebagaimana yang terjadi tahun 2024
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan baru)

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	110.000.000,00	Diusulkan sama dengan anggaran tahun 2024, karena anggaran 80 Juta sesuai Ranwal tidak mencukupi untuk membayar Honor PA dan lainnya. Penambahan Untuk Mengcover Honor PA, dan PPTK Kegiatan Penyediaan Gai dan Tunjangan ASN yang belum sesuai standar
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan Baru)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12 Berkas		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	105.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.000.000,00	Untuk Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	416.260.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB KUKAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB KUKAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket	166.260.000,00	Usul Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Baju Dinas (Batik/Korpri, Baju Miskat). Anggaran ini diajukan karena Pada Dinas Ketahanan Pangan masih belum pernah pengadaan Pakaian Dinas dimaksud, sehingga terkesan tidak ada disiplin karena baju yang dipakai beraneka ragam.
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Anggaran diusulkan sama dengan Tahun 2024, karena banyaknya Informasi Kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Perangkat daerah melalui Sistem Informasi Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	200.000.000,00	Anggaran diusulkan dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM, dalam rangka memenuhi kewajiban 20 Jam Pelatihan untuk setiap ASN. Serta Untuk Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan Pangan di Tiga Wilayah (Hulu, Tengah, dan Pantai)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	350.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		450.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	Untuk Pengadaan Kertas dan Alat Tulis Kantor lainnya dalam menunjang administrasi perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Pembelian Makan Minum Rapat dan bahan Logistik lainnya
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	KAB KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Perubahan target dari 3 Paket (Kertas Kop, Map dan Pengandaan menjadi 1 Paket (Cetak Map dan Pengandaan)

Kode	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	150.000.000,00	Untuk Membiayai Pelaksanaan Perjalanan Dinas di dalam dan Luar Daerah
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	75.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	75.000.000,00	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB KUKAR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua urusan menggunakan aplikasi, diperlukan tambahan anggaran dalam rangka pengembangan website Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	104 Unit	2.845.000.000,00	
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	945.000.000,00	Diusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Untuk Kepala Bidang (3 Bidang), mengingat kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai.
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000,00	Mobil Caroseri pendukung distribusi bahan makanan pokok di kecamatan dalam Rangka Pengendalian inflasi
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	KAB KUKAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	KAB KUKAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	700.000.000,00	Anggaran ini diusulkan mengingat kondisi mebeler pada Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak representatif, Mebel untuk Ruang rapat, Kursi Kerja serta lemari untuk pendukung dalam penataan arsip yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB KUKAR				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KAB KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket (Ruangan)	800.000.000,00	Penataan Ruang Kantor agar lebih representatif dalam Melaksanakan Tugas Fungsi Organisasi (Rehab Ruang kantor) Ruang Kerja Bidang Distribusi, Ruang Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ruang Kerja Bidang Konsumsi Pangan, Ruang Kerja Bidang Keamanan Pangan, Ruang Kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Ruang Kerja Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian) Ruang Rapat, Ruang Untuk Penyusunan Arsip, Ruang Tunggu Tamu, Ruang Untuk Penyimpanan Barang (ATK dll),
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Bulan	559.048.760,00	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 Bulan	559.048.760,00	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Pembayaran Rekening Internet Tahun 2025
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000,00	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514.048.760,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	499.048.760,00	Pembayaran Tenaga Honor sebanyak 25 Orang
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24 Unit Roda 2, 6 Unir Roda 4	75.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB KUKAR	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	28 Unit	75.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit Roda 4	25.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Mobil Jabatan sebanyak 2 Unit (Bahan Bakar dll)
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB KUKAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Pembayaran Pajak (STNK)
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2 Unit	750.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Kukar	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20 Unit	46.100.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	KAB KUKAR	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	750.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	KAB KUKAR	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	46.100.000.000,00	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Desa Sidomulyo Kec. Tabang	Jumlah Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	2 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	LANTAI JEMUR BIASA : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kec. Marang Kayu (Desa Sebutal), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi); LANTAI JEMUR UV : Kec. Sebulu (Desa Manunggal Daya), Kec. Tenggarong Seberang (Desa Karang Tunggal), Kec. Tenggarong (Kelurahan Loa Ipuh, Maluhu dan Bukit Biru); RICE MILLING UNIT : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang, Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang, Loh Sumber), Kec. Marang Kayu (Desa Sebutal), Kec. Muara Kaman (Desa Cipari Makmur, Benua Puhun, Bunga Jadi), Kec. Loa Janan (Desa Loa Duri Ulu); LANTAI JEMUR PORTABEL : Kec. Sebulu (Desa Tanjung Harapan, Segihan, Sebulu Modern), Kec. Tenggarong (Kelurahan Bukit Biru), Kec. Anggana (Desa Sidomulyo), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi, Desa sidomukti), Kec. Loa Kulu (Desa Sumber Sari), dan Pembangunan KPT di Desa Sumber Sari, Karang Tunggal dan Cipari Makmur	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	5 Unit lantai Jemur Biasa, 5 Unit Lantai Jemur UV, 10 unit Rmu dan 50 Unit Lantai Jemur Portabel, dan 1 Paket Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu	40.700.000.000,00	Usulan tambahan anggaran untuk Pembangunan Lantai jemur UV, lantai Jemur Biasa, Lantai Jemur Portabel dan Rice Milling Unit (RMU) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian (terutama untuk pengeringan) hasil pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian Berbasis kawasan, serta untuk
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Dokumen	400.000.000,00	Kegiatan Ini diperlukan dalam Koordinasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Penyusunan Peta Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan) dan Prognosa Neraca Pangan
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Desa Sidomulyo Kec. Tabang	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kecamatan Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kecamatan Marang Kayu (Desa Sebutal), Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi.	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang tersedia	5 Unit	5.000.000.000,00	Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan Paket Pembangunan Bangunan Lumbung Pangan masyarakat sebanyak 5 Unit Unit
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersebar 20 Kecamatan	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	2.175,00 57,100	1.650.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersebar 18 Kecamatan	Kecukupan Konsumsi Energi Kecukupan Konsumsi Protein	2.175,00 57,100	12.043.060.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersebar 20 Kecamatan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	225.000.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersebar 18 Kecamatan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	5	7.130.460.000,00	

Kode	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Desa Cipari makmur kec Muara Kaman dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan lengarong Seberang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	300.000.000,00	Kegiatan Diperlukan dalam Rangka menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Pasokan Stoc Pangan. Penguatan Bantuan berupa bahan pangan Pokok dalam Rangka Mencegah terjadinya kelangkaan Pangan dan Menjamin Kelancaran Distribusi Pangan melalui Toko Tani Indonesia.
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	150.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Pembinaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	7 Laporan	6.030.460.000,00	Usulan Tambahan anggaran untuk Sub Kegiatan baru, Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Peringatan Hari Pangan Seluruh Dunia, Serta Untuk Gerakan menanam Cabe dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB KUKAR	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	4 Laporan	300.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, melalui Pembinaan UMKM Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha = Berupa Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal (B2SA) Bagi UMKM dan bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	TENGGARONG SEBERANG	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	100.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	100.000.000,00	Pembinaan Gapoktan/Poktan sebagai Lembaga Distribusi Pangan (Bantuan Modal Untuk Gapoktan Berupa gabah Kering Giling
2.09.03.2.01.12	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB KUKAR	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Sambaja	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000,00	Laporan Harga pangan sebagai bahan untuk mengetahui potensi terjadinya Inflasi, melalui Pemantauan harga dilakukan secara Mingguan (setiap hari Rabu pagi) selama 12 bin (Jan-Des), Honor enumerator thin ini hanya tersedia 6 bin untuk 1 orang saja. Penambahan anggaran untuk: tambahan honor enumerator, SPPD panggil rapat koordinasi dari Petugas Kecamatan
2.09.03.2.01.16	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB KUKAR	Infomasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUKAR	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	100.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebar 20 Kecamatan	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	50 Ton	600.000.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	150 Ton	2.000.000.000,00	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 20 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	600.000.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Ton	2.000.000.000,00	Sesuai dengan Rekomendasi BPKP dalam evaluasi Cadangan Pangan, maka harus menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan rumus hitungan yang ada di Permentan No 11 Tahu 2018 Disamping itu juga dalam sebagai kegiatan Pengendalian inflasi. Pengadaan Beras Untuk Cadangan Pangan dan Penyaluran sesuai kebutuhan (Pengadaan Beras Cadangan Pangan 150 Ton = Rp. 1.800.000.000.-, Biaya Distribusi Rp. 200.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersebar 20 Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Penganeekaragaman Konsumsi pangan	30 Kelompok	825.000.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersebar 18 Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Penganeekaragaman Konsumsi pangan	30 Kelompok	2.912.600.000,00	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Dokumen Direktori Konsumsi Pangan dalam Rangka Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Muara Kaman , Sebulu, Muara Muntai,Kota Bangun, Kenohan , Kembang Janggut, Tabang, Marang Kayu, Anggana,dan Tenggarong	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	600.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32 Laporan	2.687.600.000,00	Bantuan Saprodi untuk 9 Kelompok Wanita (PKK dan dasawisma), Gerakan Makan Telor dan Minum Susu Untuk Anak Sekolah SD dalam Rangka Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan, Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Pangan Lokal berupa Pelatihan pembuatan madu Analog, Sosialisasi dan Pemberian Menu B2SA Kepada Balita Usia Dua Tahun (BADUTA) Kader Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Pondok Pangan Etam Untuk penganggulangan Kemiskinan serta Pembinaan Peserta Festival pangan Lokal
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	75.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	125.000.000,00	Pembinaan dan Evaluasi Konsumsi Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KAB KUKAR	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5 Desa	500.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	KAB KUKAR	19 Desa	2.750.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		100.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KAB KUKAR	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	250.000.000,00	Peta Rawan Pangan Sebagai Dasar Untuk Intervensi Penanganan Rawan Pangan (penganggulangan Kemiskinan). Penyusunan Peta Rawan pangan (Peta FSVA) Kab Kutai Kartanegara untuk Mengetahui Daerah yang terindikasi Rentan Rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. UU 18 tahun 2012, Pasal 114 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5 Desa/Kelurahan	400.000.000,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	21 Desa/Kelurahan	2.500.000.000,00	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Enggalam kec. Muara Wis Desa Semayang Kec. Kenohan Desa Muai Kecamatan kembang Janggut Desa Sedulang Kecamatan Muara kaman.	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Desa Kupang baru Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman, Desa Tuboq Kec. Tabang dan Desa Muara Belinau Kec. Tabang	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	21 Dokumen	1.800.000.000,00	Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 1, 8 M. Pada tahun 2025 diajukan dengan anggaran yang sama untuk dapat melakukan intervensi pada daerah yang rentan rawan pangan sebanyak 21 Desa. Selain itu agar Program Penanganan Kerawanan Pangan berjalan sesuai target dan sasaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/kota yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Difokuskan Untuk Penanganan Daerah yang terindikasi Rawan Pangan (Koor- dinasi Penanganan rawan pangan di 21 Desa Rawan pangan Prioritas 2 dan 3)
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4 Dokumen	500.000.000,00	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian Makanan Bergizi kepada anak sekolah usia emas (SMP), dan orang tua dalam rangka pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang kewaspadaan pangan dan Gizi.
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	90,77	300.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	KAB KUKAR	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	95,35	1.150.000.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	89	300.000.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	95,35	1.150.000.000,00	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan di Fokuskan Pada daerah Penghasil Pangan Segar : Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segaran Asal Tanaman) Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan lahan primer) (Pengawasan keamann PSAT pre market dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian: a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll); Masuk dalam aksi Bangda Dalam Percepatan Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	2 Dokumen	75.000.000,00	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Dokumen	300.000.000,00	Pembinaan Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Mendapatkan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar dengan cara melakukan fasilitasi : Pengawasan Keamanan PSAT Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat.. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	75.000.000,00	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Usulan Tambahan Anggaran digunakan untuk Penyediaan sarana Pengujian Keamanan Pangan (rapit Test) . Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggaraong Seberang, Muara Jawa,Sebulu,Marang Kayu, Samboja, Kota Bangun, Tenggaraong, Loa Janan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	4 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	20 Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan Mutu Pangan segar Asal Tumbuhan	20 Laporan	150.000.000,00	Tambahan Anggaran digunakan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di 20 Kecamatan yang bertujuan mengiden- tifikasi serta memverifikasi data base petani hortikultura/produsen/retail/ warung/umkm dan Koordinasi Instansi Pembina di Provinsi Kaltim
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggaraong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	50.000.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggaraong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	8 Dokumen	400.000.000,00	Tambahan Anggaran diajukan dalam Penguatan Kelembagaan pangan Segar dengan Menyusun SOP tentang kebijakan di Bidang Keamanan Pangan serta pembentukan OKKPD Penguatan Kelembagaan pangan, Aksi Bangda dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting
			TOTAL		10.837.786.621,00		TOTAL			76.120.164.434,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat baik yang disampaikan langsung melalui SIPD RI, yang merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Untuk tahun 2025 terdapat beberapa usulan masyarakat di kecamatan yang masuk dalam program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Kutai Kartanegara.

Tidak semua usulan masyarakat bisa diakomodir dalam Renja Perangkat daerah, usulan yang bisa diterima sebatas yang sesuai dengan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, serta mendukung program prioritas kepala Daerah, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program dan kegiatan usulan masyarakat yang sesuai prioritas Perangkat Daerah akan dibuat skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 (T-C 32).

Tabel 7

TABEL : TC-32					
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN					
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
A	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				
Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan pemerintah					
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Kelompok Tani Bhinnika Jaya, Dusun Sidomakmur, RT 19 Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan Proposal agar disesuaikan dengan permintaan, (Permintaan Lumbung Proporsal Mesin Pengering) Serta Melampirkan Surat Hibah Lahan dan Rekomendasi dari PPL Setempat), serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Jln. Reformasi III RT.002 Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan apabila sudah ada Proposal , Surat Keterangan dari Kepala Desa,Surat Keterangan Dari PPL Setempat, Surat Hibah Lahan, dan Foto Lokasi), serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan yang ada.
3.	Pembangunan/Rehabilitasi Lumbung Pangan	Jl. Gerbang Dayaku, Kel. Rapal Lambur Kecamatan Tenggarongb Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan akan Memfasilitasi Pembangunan Lumbung Pangan dengan Catatan apabila sudah ada Proposal , Surat Keterangan dari Kepala Desa,Surat Keterangan Dari PPL Setempat, Surat Hibah Lahan, dan Foto Lokasi), serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan yang ada.
Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					
1.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	RT.03 Dusun Tulak Tepen Desa Embalut Kecamatan tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Permohonan sudah sesuai, perlu adanya Surat Hibah Lahan serta Rekomendasi dari PPL Setempat
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Poktan Surya bakti Rt 06 Kel.Wonotirto Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Diharap untuk Upload Proporsal, serta melampirkan Rekomendasi dari Desa, PPL Setempat serta Surat Hibah Lahan
3.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Jln. Ulin RT.010 Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Pada Permohonan perlu menambahkan Surat Hibah Lahan serta Rekomendasi dari PPL Setempat
4.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Jl. Bina Tani RT. 003 Desa Semangko, Kab. Kutai Marang KayuKartanegara	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Perlu menambahkan Rekomendasi dari pihak PPL Setempat serta Surat Hibah atas lahan yang nantinya akan di bangun Lantai Jemur
5.	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	desa Sidomulyo, Kab. Kutai Kartanegara Kecamatan anggana	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Perlu menambahkan Proporsal serta Rekom dari Kepala Desa, Rekom PPL Setempat serta foto lokasi dan Surat Hibah Atas Lahan Yang nantinya akan dibangun Lantai Jemur
6	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur	Jl. Dr. Nazir RT.03, Kab. Kutai Kartanegara Desa Kayu batu Kecamatan sebulu	Tersedianya Bangunan Lantai Jemur	1 Unit	Untuk Perihal serta Isi Proporsal harap di perjelas sesuai dengan kebutuhan (Lantai Jemur) dan melampirkan Rekom dari PPL Setempat Serta Surat Hibah atas lahan yang nantinya akan dibangun Lantai Jemur

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam memantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Kedaulatan pangan memberikan dukungan kekuatan dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri yang diarahkan untuk menyediakan beraneka ragam pangan dari produksi dalam negeri sesuai potensi sumber daya yang kita miliki. Ketersediaan pangan yang beraneka ragam akan mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Permentan 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Serta Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur "Berani untuk Kaltim Berdaulat, pada Misi Kedua Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan Dengan demikian, dapat segera terwujud manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga sampai dengan perseorangan/individu.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati Terpilih, Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah Pemantapan pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi dan transformasi Pembangunan. Dalam **misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.**

Sesuai dengan Fokus dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kedua tujuan Renja tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan. Tujuan tersebut akan dijabarkan melalui sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Adapun Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan target nilai tahun 2025 sebesar 80.
2. Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2025 sebesar 118%.
3. Meningkatnya Pencapaian Score PPH ketersediaan dengan target score tahun 2025 sebesar 91.

4. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah, yang ditunjukkan dengan Tercapainya ketersediaan energi sesuai standar sebesar 2456 kkal/kapita/hari, serta ketersediaan protein sebesar 115 gram/perkapita/hari pada tahun 2025.
5. Menurunnya jumlah desa/kelurahan yang terindikasi rawan pangan sebanyak 20 desa Untuk tahun 2025.
6. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan dengan skor PPH pada tahun 2025 sebesar 88
7. Tercapainya tingkat keamanan pangan segar sebesar 93,45% pada tahun 2025.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir tahun
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	76,01	77	78	79	80	81	81
2	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	128,72	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	140,00
3	Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skore	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	100,00
4	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2365	2372	2379	2386	2393	2400	2400
	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	79,04	79,42	79,84	80,21	80,59	80,97	80,97
5	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	81,30	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	49,00
7	Kecukupan Konsumsi Energi dan Kecukupan konsumsi Protein							
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	1971,00	2.050,00	2.150,00	2.175,00	2.200,00	2.225,00	2.225,00
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari)	54,70	55,50	57,00	57,10	57,20	57,25	57,25
8	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
9	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	90,77	90,77	91,00	91,50	92,00	93,00	93,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana program prioritas beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung visi misi Bupati menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 Tahun 2021 dapat diwujudkan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Meliputi :
 - Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi kedua **misi 2 : "Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.**
 - Pengentasan Kemiskinan pada daerah rawan dan rentan pangan
 - Peningkatan Kualitas konsumsi pangan Daerah dengan pemberdayaan Masyarakat.
 - Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan Daerah
 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - Pencapaian Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sesuai hasil analisis terhadap program dan kegiatan, serta memperhatikan usulan masyarakat, dan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sebanyak 5 (Lima) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan, dengan Rencana Anggaran yang telah disusun sebesar Rp. 76.120.164.434,00 secara garis besar dapat diuraikan sebagai mana tabel 9 berikut :

Tabel 9

RINGKASAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN		
DINAS KETAHANAN PANGAN		
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
TAHUN 2025		
Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.077.104.434,00
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	250.000.000,00
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	50.000.000,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.626.795.674,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.466.795.674,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	110.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	416.260.000,00
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	166.260.000,00
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.000.000,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.845.000.000,00
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	945.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	700.000.000,00
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	559.048.760,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.048.760,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	46.100.000.000,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	46.100.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	40.700.000.000,00
2.09.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	400.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabup	5.000.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12.043.060.000,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	7.130.460.000,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	300.000.000,00
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150.000.000,00
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	6.030.460.000,00
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000,00
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.912.600.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	100.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.687.600.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	125.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.750.000.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	250.000.000,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	250.000.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000,00
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	200.000.000,00
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	500.000.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.150.000.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.150.000.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	300.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	150.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	400.000.000,00
		76.120.164.434,00

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Semua Program dan kegiatan dalam Rancangan Renja ini telah disesuaikan dengan program dan kegiatan sesuai Permendagri No 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023, demikian juga untuk pagu anggarannya. Namun demikian akan dilaksanakan sinkronisasi dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, disusun sekala prioritas sehingga rancangan renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Rencana Anggaran pada Rancangan Renja Sebesar Rp. 76.120.164.434,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan prioritas :

- Pembayaran gaji ASN.
- Kegiatan Generik (operasional kantor)
- Pengentasan Kemiskinan
- Penanggulangan Inflasi
- Rencana Aksi Penurunan stunting
- Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
- Mendukung Program Bupati dalam penanggulangan kemiskinan

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 10 (TC 33) sebagaimana berikut.

TABEL : 10
Tabel TC 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	KAB KUKAR	79	14.077.104.434,00	APBD KAB		79	7.677.786.621,00
000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	KAB KUKAR	13 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD KAB		13 Dokumen	350.000.000,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	3 Dokumen	450.000.000,00	APBD KAB	Pengalokasian termasuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, serta Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat (APBN dan DAK, APBD Prov dan Bantuan Keuangan) Pagu Awal 80.000.000 menjadi 150.000.000, Fasilitas untuk Rapat koordinasi internal dan eksternal dalam Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 Pagu Awal 20.000.000 menjadi 50.000.000, penyusunan Renstra 2025-2030 dengan subtransi isi mengkaji permasalahan, isu strategis daerah dan kebijakan dari provinsi dan nasional. Pagu Awal 100.000.000 menjadi 250.000.000	6 Dokumen	200.000.000,00
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB KUKAR	5 Laporan	50.000.000,00	APBD KAB		5 Laporan	50.000.000,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB KUKAR	5 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk Melaksanakan Analisis permasalahan capaian kinerja melalui hasil E Pantau Tri Wulan 1,2,3 ,4 dan Laporan Akhir P (pagu Awal 100.000.000 menjadi 150.000.000	5 Laporan	100.000.000,00
2.09.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Sub Kegiatan Baru) Untuk Pemenuhan Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara		
2.09.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	KAB KUKAR	1 Data	250.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pemenuhan Dokumen Pada Satu Data Indonesia Kukar. atau Data (BECIK) - Kecamatan sebagai pusat data (operasional, Honorarium, Peralatan, pendampingan teknis) (Sub Kegiatan baru)		
2.09.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB KUKAR	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Tahun 2026, dan Penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	KAB KUKAR	12 Laporan	8.626.795.674,00	APBD KAB		12 Laporan	6.303.737.861,00
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB KUKAR	56 Orang/bulan	8.466.795.674,00	APBD KAB	Mengikuti hasil perhitungan tahun 2024 untuk mengantisipasi kenaikan Gaji dan Perpindahan Pegawai sebagaimana yang terjadi tahun 2024	56 Orang/bulan	6.223.737.861,00
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB KUKAR	1 Laporan	25.000.000,00	APBD KAB	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan baru)		
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	110.000.000,00	APBD KAB	Diusulkan sama dengan anggaran tahun 2024, karena anggaran 80 Juta sesuai Ranwal tidak mencukupi untuk membayar Honor PA dan lainnya. Penambahan Untuk Mengcover Honor PA, dan PPTK Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang belum sesuai standar	12 Laporan	80.000.000,00
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB KUKAR	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan Baru)		
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	KAB KUKAR	12 Dokumen	105.000.000,00	APBD KAB		12 Dokumen	40.000.000,00
2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	1 laporan	25.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)		
2.09.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB KUKAR	1 laporan	50.000.000,00	APBD KAB	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan baru)	12 Laporan	40.000.000,00
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB	Untuk Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD pada Perangkat Daerah		
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		6 Dokumen	416.260.000,00	APBD KAB		6 Dokumen	-
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KAB KUKAR	170 Paket	166.260.000,00	APBD KAB	Usul Penambahan Anggaran untuk Pengadaan Baju Dinas (Batik/Korpri, Baju Miskat). Anggaran ini diajukan karena Pada Dinas Ketahanan Pangan masih belum pernah pengadaan Pakaian Dinas dimaksud, sehingga terkesan tidak ada disiplin karena baju yang dipakai beraneka ragam.		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB KUKAR	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD KAB	Anggaran diusulkan sama dengan Tahun 2024, karena banyaknya Informasi Kepegawaian yang harus dilaksanakan oleh Perangkat daerah melalui Sistem Informasi Kepegawaian		
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB KUKAR	25	200.000.000,00	APBD KAB	Anggaran diusulkan dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM, dalam rangka memenuhi kewajiban 20 Jam Pelatihan untuk setiap ASN. Serta Untuk Peningkatan Kapasitas Petugas Keamanan Pangan di Tiga Wilayah (Hulu, Tengah, dan Pantai)		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB KUKAR		450.000.000,00	APBD KAB			350.000.000,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	2 Paket	55.000.000,00	APBD KAB	Untuk Pengadaan Kertas dan Alat Tulis Kantor lainnya dalam menunjang administrasi perkantoran	1 Paket	55.000.000,00
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Pembelian Makan Minum Rapat dan bahan Logistik lainnya	4 Paket	50.000.000,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Paket	20.000.000,00	APBD KAB	Perubahan target dari 3 Paket (Kertas Kop, Map dan Penggandaan menjadi 1 Paket (Cetak Map dan Penggandaan)	1 Paket	20.000.000,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB KUKAR	120 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Untuk Membiayai Pelaksanaan Perjalanan Dinas di dalam dan Luar Daerah	200 Laporan	150.000.000,00
2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB KUKAR	2000 Dokumen	75.000.000,00	APBD KAB		2000 Dokumen	75.000.000,00
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Semua urusan menggunakan aplikasi, diperlukan tambahan anggaran dalam rangka pengembangan website Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	KAB KUKAR	104 Unit	2.845.000.000,00	APBD KAB		3 Unit	-
2.09.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KAB KUKAR	3 Unit	945.000.000,00	APBD KAB	Diusulkan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Untuk Kepala Bidang (3 Bidang), mengingat kendaraan yang ada sudah tidak layak pakai.		
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KAB KUKAR	1 Unit	400.000.000,00	APBD KAB	Mobil Caroseri pendukung distribusi bahan makanan pokok di kecamatan dalam Rangka Pengendalian inflasi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KAB KUKAR	100 Unit	700.000.000,00	APBD KAB	Anggaran ini diusulkan mengingat kondisi mebel pada Dinas Ketahanan Pangan sudah tidak representatif, Mebel untuk Ruang rapat, Kursi Kerja serta lemari untuk pendukung dalam penataan arsip yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan.		
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		KAB KUKAR	1 Paket (Ruang)	800.000.000,00	APBD KAB	Penataan Ruangan Kantor agar lebih representatif dalam Melaksanakan Tugas Fungsi Organisasi (Rehab Ruang kantor) Ruang Kerja Bidang Distribusi, Ruang Kerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ruang Kerja Bidang Konsumsi Pangan, Ruang Kerja Bidang Keamanan Pangan, Ruang Kerja Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Ruang Kerja Sekretariat (Sub Bagian Umum, Kepegawaian) Ruang Rapat, Ruang Untuk Penyusunan Arsip, Ruang Tunggu Tamu, Ruang Untuk Penyimpanan Barang (ATK dll).		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	KAB KUKAR	12 Bulan	559.048.760,00	APBD KAB		12 Bulan	559.048.760,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB	Pembayaran Rekening Internet Tahun 2025	12 Laporan	30.000.000,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	4 Laporan	30.000.000,00	APBD KAB		4 Laporan	15.000.000,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB KUKAR	12 Laporan	499.048.760,00	APBD KAB	Pembayaran Tenaga Honor sebanyak 25 Orang	12 Laporan	514.048.760,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	KAB KUKAR	28 Unit	75.000.000,00	APBD KAB		28 Unit	75.000.000,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	KAB KUKAR	2 Unit	25.000.000,00	APBD KAB	Pemeliharaan Mobil Jabatan sebanyak 2 Unit (Bahan Bakar dll)	2 Unit Roda 4	25.000.000,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB KUKAR	28 Unit	50.000.000,00	APBD KAB	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Pembayaran Pajak (STNK)	24 Unit Roda 2 dan 4 Unit Roda 4	50.000.000,00
2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kab. Kukar	20 Unit	46.100.000.000,00	APBD KAB		20 Unit	750.000.000,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	20 Unit	46.100.000.000,00	APBD KAB		20 Unit	750.000.000,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Jumlah Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	LANTAI JEMUR BIASA : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Bunga Jadi); LANTAI JEMUR UV : Kec. Sebulu (Desa Manunggal Daya), Kec. Tenggarong Seberang (Desa Karang Tunggal), Kec. Tenggarong (Kelurahan Loa Ipuh, Maluhu dan Bukit Biru); RICE MILLING UNIT : Kec. Tenggarong (Kel Mangkurawang, Bukit Biru), Kec. Loa Kulu (Desa Sungai Payang, Loh Sumber), Kec. Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kec. Muara Kaman (Desa Cipari Makmur, Benua Puhun, Bunga Jadi), Kec. Loa Janan (Desa Loa Duri Ulu); LANTAI JEMUR PORTABEL :	5 Unit lantai Jemur Biasa, 5 Unit Lantai Jemur UV, 10 unit Rmu dan 50 Unit Lantai Jemur Portabel, dan 1 Paket	40.700.000.000,00	APBD KAB	Usulan tambahan anggaran untuk Pembangunan Lantai jemur UV, lantai Jemur Biasa, Lantai Jemur Portabel dan Rice Milling Unit (RMU) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu hasil produksi pertanian (terutama untuk pengeringan) hasil pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian Berbasis kawasan, serta untuk	2	200.000.000,00
2.09.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	KAB KUKAR	2 Dokumen	400.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Ini diperlukan dalam Koordinasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (Penyusunan Peta Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan) dan Prognosa Neraca Pangan	1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.02.2.01.06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kecamatan Tenggarong (Kel Mangkurawang dan Bukit Biru), Kecamatan Loa Kulu (Desa Sungai Payang), Kecamatan Marang Kayu (Desa Sebuntal), Kecamatan Muara Kaman (Desa Bunga Jadi.	5 Unit	5.000.000.000,00	APBD KAB	Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan Paket Pembangunan Bangunan Lumbung Pangan masyarakat sebanyak 5 Unit Unit	1	500.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Tersebar 18 Kecamatan	2.175,00	12.043.060.000,00	APBD KAB		2.175,00	1.650.000.000,00
		Kecukupan Konsumsi Protein		57,100		APBD KAB		57,100	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Tersebar 18 Kecamatan	5	7.130.460.000,00	APBD KAB		5	225.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Desa Cipari makmur kec Muara Kaman dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan tengarong Seberang	2 Unit	300.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Diperlukan dalam Rangka menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Pasokan Stoc Pangan. Peningkatan Bantuan berupa bahan pangan Pokok dalam Rangka Mencegah terjadinya kelangkaan Pangan dan Menjamin Kelancaran Distribusi Pangan melalui Toko Tani Indonesia.		
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KAB KUKAR	100 Keluarga	150.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangsa Dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Pembinaan Keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Pangan		
2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	TENGGARONG SEBERANG	7 Laporan	6.030.460.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan anggaran untuk Sub Kegiatan baru, Untuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Peringatan Hari Pangan Seluruh Dunia, Serta Untuk Gerakan menanam Cabe dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara		
2.09.03.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	KAB KUKAR	4 Laporan	300.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangsa Dalam Percepatan Penurunan Stunting, melalui Pembinaan UMKM Pangan Lokal dalam Pengembangan Usaha = Berupa Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal B2SA) Bagi UMKM dan bantuan Alat		
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	1 Unit	100.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan Gapoktan/Poktan sebagai Lembaga Distribusi Pangan (Bantuan Modal Untuk Gapoktan Berupa gabah Kering Giling	1 Unit	100.000.000,00
2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kembang Janggut, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong, Loa Janan, Muara Badak, Samboja	1 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Laporan Harga pangan sebagai bahan untuk mengetahui potensi terjadinya inflasi, melalui Pemantauan harga dilakukan secara Mingguan (setiap hari Rabu pagi) selama 12 bln (Jan-Des). Honor enumerator thn ini hanya tersedia 6 bln untuk 1 orang saja. Penambahan anggaran untuk tambahan honor enumerator, SPDP panggil rapat koordinasi dari Petugas Kecamatan, bantuan paket data internet, perjalanan dinas, dll. (Sama dengan Anggaran tahun 2024)	2 Laporan	50.000.000,00
2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat, meliputi Dokumen Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Energi, Protein dll	2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan pangan Pemerintah	Tersebar 18 Kecamatan	150 Ton	2.000.000.000,00	APBD KAB		150 Ton	600.000.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersebar 18 Kecamatan	150 Ton	2.000.000.000,00	APBD KAB	Sesuai dengan Rekomendasi BPKP dalam evaluasi Cadangan Pangan, maka harus menyediakan Cadangan Pangan sesuai dengan rumus hitungan yang ada di Permentan No 11 Tahun 2018 Disamping itu juga dalam sebagai kegiatan Pengendalian inflasi. Pengadaan Beras Untuk Cadangan Pangan dan Penyaluran sesuai kebutuhan (Pengadaan Beras Cadangan Pangan 150 Ton = Rp.1.800.000.000,-, Biaya Distribusi Rp. 200.000.000,00	60	600.000.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi pangan	Tersebar 18 Kecamatan	30 Kelompok	2.912.600.000,00			30 Kelompok	825.000.000,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KAB KUKAR	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Penyusunan Dokumen Direktori Konsumsi Pangan dalam Rangka Peningkatan Skore Pola Pangan Harapan	2 Dokumen	150.000.000,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Kecamatan	32 Laporan	2.687.600.000,00	APBD KAB	Bantuan Saprodi untuk 9 Kelompok Wanita (PKK dan dasawisma), Gerakan Makan Telor dan Minum Susu Untuk Anak Sekolah SD dalam Rangka Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan, Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Pangan Lokal berupa Pelatihan pembuatan madu Analog, Sosialisasi dan Pemberian Menu B2SA Kepada Balita Usia Dua Tahun (BADUTA) Kader Posyandu untuk Pencegahan Stunting, Pondok Pangan Etam Untuk penanggulangan Kemiskinan serta Pembinaan Peserta Festival pangan Lokal	15 Laporan	600.000.000,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	4 Laporan	125.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	4 Laporan	75.000.000,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	19 Desa	2.750.000.000,00	APBD KAB		5 Desa	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	KAB KUKAR	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD KAB		1 Dokumen	100.000.000,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	KAB KUKAR	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD KAB	Peta Rawan Pangan Sebagai Dasar Untuk Intervensi Penanganan Rawan Pangan (penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan Peta Rawan pangan (Peta FSVA) Kab Kutai Kartanegara untuk Mengetahui Daerah yang terindikasi Rentan Rawan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. UU 18 tahun 2012, Pasal 114 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.	2 Dokumen	100.000.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	KAB KUKAR	21 Desa/Kelurahan	2.500.000.000,00	APBD KAB		19 Desa/Kelurahan	400.000.000,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Desa Kupang baru Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman, Desa Tuboq Kec. Tabang dan Desa Muara Belinau Kec. Tabang	21 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD KAB	Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 1, 8 M. Pada tahun 2025 diajukan dengan anggaran yang sama untuk dapat melakukan intervensi pada daerah yang rentan rawan pangan sebanyak 21 Desa. Selain itu agar Program Penanganan Kerawanan Pangan berjalan sesuai target dan sasaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Dokumen	300.000.000,00
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB KUKAR	2 Laporan	200.000.000,00	APBD KAB	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/kota yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. Difokuskan Untuk Penanganan Daerah yang terindikasi Rawan Pangan (Koor- dinasi Penanganan rawan pangan di 21 Desa Rawan pangan Prioritas 2 dan 3)	4 Laporan	100.000.000,00
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	KAB KUKAR	4 Dokumen	500.000.000,00	APBD KAB	Kegiatan Untuk mendukung Aksi Penurunan Stunting dan Masuk dalam aksi Bangsa Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemberian Makanan Bergizi kepada anak sekolah usia emas (SMP), dan orang tua dalam rangka pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang kewaspadaan pangan dan Gizi.		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	KAB KUKAR	95,35	1.150.000.000,00	APBD KAB		95,35	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025(N)					Rencana Tahun 2026(N+1)	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar	KAB KUKAR	95,35	1.150.000.000,00	APBD KAB		95,35	300.000.000,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	20 Dokumen	200.000.000,00	APBD KAB	Rekomendasi Keamanan Pangan di Fokuskan Pada daerah Penghasil Pangan Segar : Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segaran Asal Tanaman) Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer) Pengawasan keamann PSAT pre market dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian: a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll); Masuk dalam aksi Bangsa Dalam Percepatan Penurunan Stunting	1 Dokumen	50.000.000,00
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	20 Kecamatan (20 Pasar / gapoktan)	20 Dokumen	300.000.000,00	APBD KAB	Pembinaan Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk Mendapatkan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar dengan cara melakukan fasilitasi : Pengawasan Keamanan PSAT Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat.. Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangsa dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting.	2 Dokumen	75.000.000,00
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	20 Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD KAB	Usulan Tambahan Anggaran digunakan untuk Penyediaan sarana Pengujian Keamanan Pangan (rapit Test) . Kegiatan ini Masuk dalam Aksi Bangsa dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting	4 Dokumen	75.000.000,00
2.09.05.2.01.08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	20 Kecamatan	20 Laporan	150.000.000,00	APBD KAB	Tambahan Anggaran digunakan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan di 20 Kecamatan yang bertujuan mengiden- tifikasi serta memverifikasi data base petani hortikultura/produsen/retail/ warung/umkm dan Koordinasi Instansi Pembina di Provinsi Kaltim	4 Laporan	50.000.000,00
2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marang kayu, Kota Bangun, sebulu, Muara Jawa , Muara Badak	8 Dokumen	400.000.000,00	APBD KAB	Tambahan Anggaran diajukan dalam Penguatan Kelembagaan pangan Segar dengan Menyusun SOP tentang kebijakan di Bidang Keamanan Pangan serta pembentukan OKKPD Penguatan Kelembagaan pangan, Aksi Bangsa dalam Rangka Aksi Penurunan Stunting	4 Dokumen	50.000.000,00
			TOTAL		76.120.164.434,00				10.877.786.621,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan terutama peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

- A. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka pelaksanaan renja yang telah disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kutai Kartanegara visi dan misi Kepala Daerah, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh Stakeholder. Apabila didalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan.

- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 berpedoman pada :

- 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2023,
- 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

C. Rencana Tindak Lanjut.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi anggaran dalam menunjang pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang untuk tahun berjalan, sehingga apabila terjadi perubahan terkait ketersediaan anggaran dan lainnya bisa segera disesuaikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kesiapan bidang bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga Renja Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan Program dan kegiatan dalam pembangunan Ketahanan Pangan.

Tenggarong, 5 Agustus 2024



LAMPIRAN - LAMPIRAN